

MODEL RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

Dadang Darmawan

Jurusan Ilmu Al-Quran Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl.A.H. Nasution 105 Cibiru,Bandung 40614.Indonesia.

E-mail: dadangdarmawan76@gmail.com

Abstract

This article discusses how the relationship between Indonesia and the Islamic community in Indonesia is represented by Islamic affiliated organizations in early independence until the reformation period in 1998. See the growing phenomenon of many religious organizations that emerge from fundamental, radical, secular to syncretism. Upheavals between the government and religious organizations to bring the phenomenon of Islamic archipelago. one theme that is being initiated between the government and the people of Islam Indonesia, which is expected to become an Islamic model that represents the nation of Indonesia in the eyes of the world.

Keywords:

Radical, Secular, Syncretism.

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dan masyarakat Islam di Indonesia diwakili oleh organisasi afiliasi Islam pada awal kemerdekaan sampai masa reformasi pada tahun 1998. Melihat fenomena yang berkembang dari banyak organisasi keagamaan yang muncul dari fundamental, radikal, sekuler hingga sinkretisme. Gejolak antara pemerintah dan organisasi keagamaan membawa fenomena kepulauan Islam. satu tema yang diprakarsai antara pemerintah dan umat Islam Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi model Islam yang mewakili bangsa Indonesia di mata dunia.

Kata Kunci:

Radikal;Sekuler;Sinkretisme.

A. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi tahun 1998 dapat digambarkan sebagai “banjir besar” yang meruntuhkan “bendungan kokoh” yang selama 30 tahun dibangun oleh Orde Baru (ORBA). Kita tahu bahwa fungsi bendungan adalah untuk mengontrol mana air yang boleh lewat dan mana yang tidak. Hal yang sama juga dilakukan oleh ORBA, dengan kekuasaannya, ORBA berupaya mengontrol dengan sangat ketat mana aspek-aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya (IPOLEKSOSBUD) yang boleh berkembang, dan mana yang harus dibendung demi alasan pertahanan dan keamanan (HANKAM).¹

Islam sebagai agama mayoritas, juga mengalami bendungan yang sama. Pada masa ORBA, hanya varian tertentu dari IPOLEK-SOSBUD Islam yang boleh berkembang, sedangkan sisanya yang dianggap berbeda dengan keinginan ORBA, ditekan, dibasmi, dikejar, dan dijejaskan ke dalam penjara. Musuh-musuh ORBA menuduh bahwa ORBA tengah melakukan “politik belah bambu”, yakni mengangkat kelompok yang disukai setinggi-tingginya dan menginjak kelompok yang tidak disukai serendah-rendahnya. Yang

Wawasan Nusantara. Dalam tataran aksi pemerintah ORBA yang menyebut dirinya sebagai “orde ketertiban” mendirikan lembaga KOPKAMTIB (Komando Keamanan dan Ketertiban) yang kemudian diganti dengan BAKORSTANAS (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) sebagai lembaga yang berfungsi melakukan “penertiban”, dengan tindakan-tindakan represif serta penangkapan-penangkapan terhadap rakyat yang dianggap membahayakan kekuasaan. Lihat Muridan S. Widjojo dan Mashudi Noorsalam, *Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 129

¹ Istilah IPOLEKSOSBUDHANKAM sangatlah terkenal pada masa ORBA, Istilah itu menunjukkan hal-hal yang menjadi perhatian dan berusaha dikontrol oleh ORBA. Dalam tataran konsep setiap warga Negara diajarkan hal ini lewat penataran P4 dibawah judul

satu diarus-utamakan, sedang yang lain dimarginalkan.²

Ketika “bendungan” ORBA itu dihancurkan oleh gerakan reformasi tahun 1998, maka bak air bah, berbagai varian IPOLEKSOSBUD Islam yang semula dihambat perkembangannya, kembali muncul ke permukaan dan ikut mengubah secara dramatis konstruksi relasi Islam dengan Negara yang selama ini sudah terbangun. Hal inilah yang akan menjadi objek pembahasan tulisan ini, tegasnya, makalah ini akan mencoba memetakan berbagai Fase atau bentuk hubungan Islam dan Negara pasca gerakan reformasi tahun 1998. Tetapi sebelumnya penulis ingin memaparkan bagaimana model/bentuk hubungan Islam dan Negara sebelum masa reformasi tahun 1998 sebagai wacana perbandingan bagi kita semua.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Islam Dan Negara Pra Reformasi Tahun 1998

a. Relasi Islam dengan Orde Lama (model Islam Idiologi)

Indonesia, bahkan sejak masa sebelum reformasi memiliki potret yang sangat unik. Donald K. Emerson menyebut Islam di Indonesia sebagai “*an active minority within a numerical majority*”.³

Di Indonesia umat Islam memang mayoritas dari segi KTP atau sering disebut dengan istilah Islam KTP, tetapi minoritas dari segi pengamalan ibadah, intelektual, sosial, politik maupun ideologi.⁴ Konsekuensi dari

kondisi itu menyebabkan posisi umat Islam menjadi lemah, bahkan sejak zaman Orde Lama (ORLA). Umat Islam tidak bisa memaksakan agendanya sendiri, melainkan harus berkompromi dengan agenda-agenda negara dalam hal-hal yang terkadang dianggap bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam, misalnya saja dalam kasus penerapan azas tunggal Pancasila.⁵

b. Relasi Islam dan Orde Baru (Model Islam Nasionalis)

Ketika pancasila lahir dan menjadi asas tunggal yang dipilih oleh orde lama dan orde baru, maka seluruh elemen bangsa dipaksakan harus tunduk pada ideology tersebut termasuk Umat Islam. Umat Islam harus bersikap reaktif dan memberikan jawaban yang kompromistis. Fase ini merupakan fase yang paling sulit. Umat Islam didesak sedemikian rupa secara ideologis dan politis untuk meninggalkan azas Islam dan menerima azas tunggal Pancasila. Hal ini sempat menimbulkan kegaduhan sosial dan politik yang luar

Indonesia memang muslim. Islam dianut oleh hampir 90% rakyat Indonesia. Namun jika dilihat dari sudut pelaksanaan ibadah ritual, prosentasi itu akan menurun secara drastis. Apalagi kalau dilihat dari segi intelektual, sosial dan ideologis. *Ibid*, h.42-43.

⁵ Taufik Abdullah menggambarkan semakin lemahnya posisi Islam di Indonesia dengan ungkapan sebagai berikut:

“..bermula sebagai pengambil inisiatif...kemudian terdesak sebagai salah satu unsur peserta dan pendamping dalam dialog, akhirnya makin dipaksa sebagai unsur yang bersifat reaktif. Adalah Sarekat Islam (SI) pertama yang secara tepat... merumuskan apa arti struktur kolonial dan memberikan jawaban politik yang sesuai. Tetapi kemudian SI/PSII dan partai-partai Islam lain kehilangan inisiatif. Mereka hanyalah salah satu unsur dari kelompok solidaritas atau dari partai lain. Bahkan tidak jarang inisiatif diambil oleh kelompok lain itu, seperti pembentukan PPKI, yang diprakarsai oleh PNI (1928). Usaha perumusan UUD yang gagal di konstituante adalah puncak dari peranan “golongan Islam” sebagai partner dalam dialog. Sejak terbentuknya Demokrasi terpinpin, ... mereka... diharuskan untuk merumuskan jawaban terhadap inisiatif yang dimulai oleh faktor-faktor luar.”

Lihat: Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.44.

²Musuh-musuh ORBA dari kalangan Islam sering mengibaratkan pemerintahan ORBA sebagai Fir'aun sebagaimana diceritakan dalam QS: 28:4, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

“*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan mereka sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.*”

³ M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.41.

⁴ Jalaluddin Rahmat menggambarkan Islam di Indonesia sebagai “*an active minority within a numerical majority*”. Dengan lima pendekatan: demografis, ritual, intelektual, sosial dan ideologis. Bila dilihat dari sudut demografis mayoritas penduduk

biasa hingga telah mengantarkan banyak sekali tokoh-tokoh Islam ke dalam penjara.⁶

Namun ketegangan dengan ORBA ini telah menyadarkan kaum intelektual muda muslim pada dekade tahun 80-an seperti Cak Nur dan Gus Dur bahwa Islam di Indonesia lebih bersifat kultural dibandingkan politis. Islam di Indonesia menjadi kekuatan pemersatu bagi berbagai etnis yang beragam tanpa kemudian menjadi kekuatan pemaksa. Islam bukan menjadi faktor objek nasionalisme bangsa, melainkan sekedar "penjinak sentimen etnis", yang dengan itu penduduk Indonesia yang terdiri dari sejumlah etnis yang beragam ini dapat lebih cair dalam berhubungan satu sama lain. Islam yang bersifat kultural inilah yang menjadi kekuatan nyata Islam di Indonesia.

Belakangan pada era 90-an ketika kaum muslimin sudah terbiasa dengan Pancasila dan telah bisa melupakan politik aliran, mereka mulai terintegrasi secara sinergis dengan negara. Mereka mengembangkan penafsiran baru atas Islam yang menekankan pada substansinya. Dengan pendekatan baru ini mereka melihat Pancasila dan negara sebagai wadah yang dapat mereka isi dengan substansi Islam, yaitu berupa nilai-nilai universalnya. Dalam fase ini, Islam yang sudah ditafsirkan secara substansial itu tidak lagi bertentangan dengan nasionalisme, tapi mewarnainya.

Islam yang seperti ini ternyata direstui oleh pemerintah ORBA. Diawali oleh langkah-langkah pendahuluan oleh tokoh-tokoh ICMI semacam Akbar Tanjung. Para Politisi Islam mulia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan ORBA. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an tumbuh suatu hubungan romantis antara Islam dan ORBA. Apalagi setelah dibentuknya ICMI yang digagas oleh B.J. Habibie, banyak sekali tokoh-tokoh profesional muslim yang diangkat sebagai pejabat pemerintahan.⁷ Sehingga dalam konteks politik mulai muncul satu

model Islam yang disebut Islam Nasionalis atau belakangan disebut Nasionalis Religius.

Islam Nasionalis merupakan kelompok mayoritas saat ini. Kelompok Islam ini telah terintegrasi dengan baik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada dalam benak mereka cita-cita ingin mendirikan Negara Islam atau menerapkan syariat Islam. Bagi mereka keputusan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dari kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara sudah final. Namun bukan berarti mereka adalah semata-mata kelompok Islam Abangan. Banyak sekali dari mereka yang sangat menghayati kehidupan keagamaan sebagai seorang muslim. Sebagai pribadi-pribadi mereka adalah muslim yang taat. Hanya saja mereka menjadikan Islam sebagai wilayah pribadi, sementara dalam kehidupan bernegara mereka berinteraksi atas dasar prinsip-prinsip sekular, walaupun boleh jadi itu dilakukan untuk kepentingan Islam, tapi bukan untuk memperjuangkan ideologi Islam, melainkan terutama untuk memperjuangkan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat Islam, agar tidak dianak-tirikan oleh pemerintah.

Terhadap kelompok Islam nasionalis ini, Negara tidak menaruh curiga sedikit pun. Demikian kelompok-kelompok non muslim juga dapat menerima dengan baik kelompok Islam nasionalis ini. Mereka dianggap sebagai pilar kekuatan berbangsa dan bernegara. Bahkan tokoh-tokoh politik dari kalangan Islam nasionalis ini banyak yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, juga dalam partai-partai yang berModel nasionalis seperti Golkar, sebut saja misalnya Akbar Tanjung, Yusuf Kalla dan lain sebagainya.

Keadaan umat Islam Indonesia sebagai "*an active minority within a numerical majority*" menjadi penyebab lemahnya posisi Islam *vis a vis* negara. Hal ini karena Islam tidak menjadi orientasi politik dan ideologi bagi kebanyakan orang-orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada tahun 50-an misalnya, ketika kelompok Islam di parlemen gagal menjadikan Syariat Islam sebagai

⁶ Mengenai kehebohan tersebut lihat misalnya A. Mustofa Bisri, *Koridor: Renungan A. Mustofa Bisri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h.77-80.

⁷ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), h. 333-335.

ideologi Negara,⁸ maka bersamaan dengan itu kasus Darul Islam pimpinan Kartosoewiryo berhasil diturunkan oleh pemerintah ORLA dari masalah ideologi-politis dimata masyarakat di ubah menjadi semata-mata masalah keamanan saja.⁹ Sejak kasus itulah Syariat Islam dalam bentuknya sebagai ideologi alternatif bagi bangsa Indonesia mengalami kemunduran atau gagal di terapkan. Karena kejadian itu negara seolah-olah mengatakan bahwa perdebatan tentang ideologi negara dengan Islam telah selesai, dengan kemenangan berada di tangan kaum nasionalis sekuler.

2. Relasi Islam Dan Negara Pasca Reformasi Tahun 1998

Reformasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah memunculkan kembali berbagai arus pemikiran Islam yang telah ditekan sedemikian rupa pada zaman ORBA. ORBA sendiri sebagaimana telah disinggung, telah melahirkan Model “Islam Nasionalis”. Namun, pada masa reformasi ini telah muncul kembali Model-Model Islam yang lainnya di samping Islam Nasionalis ini, yaitu “Islam Fundamentalis”, “Islam Radikal”, “Islam Anarkis”, “Islam Teroris”, dan “Islam sempalan”. Kategorisasi ini didasari oleh perbedaan pemikiran, gerakan dan respons negara terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok Islam tersebut.

⁸ Pada tahun 1950-an digelar secara marathon sidang-sidang di parlemen membicarakan masalah dasar negara. Kelompok Islam tentu saja bersikukuh hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Lihat: Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 2000).

⁹ Darul Islam atau Negara Islam Indonesia diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proklamasi tersebut selain sebagai tanggapan terhadap kecenderungan NKRI ke arah sekuler juga merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita teologis negara Islam. Darul Islam atau Negara Islam Indonesia ini berpusat di Jawa Barat dan mempunyai pengaruh yang cukup besar di Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Gerakan ini dapat diredam sekitar awal tahun 60-an.

a. Model Islam Fundamentalis

Islam Fundamentalis adalah mereka yang mencita-citakan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Mereka menempuh jalan kooperatif dengan mendirikan partai Islam, mereka berharap partai mereka memperoleh dukungan luas dari masyarakat lewat pemilu, dengan demikian mereka dapat meratifikasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia tanpa hambatan. Secara umum mereka menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tidak bermaksud mendirikan Negara Islam. Tujuan mereka sebatas mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional lewat lembaga DPR dan Kepresidenan.

Terhadap kelompok Islam Fundamentalis ini, negara pada zaman reformasi ini bersikap kooperatif juga. Walaupun Ada sedikit kecurigaan dari negara, bawasanya barangkali ada agenda tersembunyi di balik kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan. Tapi secara umum Negara tidak dapat melakukan apapun kecuali menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka atas dasar HAM dan Demokrasi. Negara (penguasa) saat ini rupanya yakin bahwa partai-partai Islam fundamentalis ini tidak akan mendapat dukungan mayoritas, Mengingat hasil perolehan suara mereka dalam pemilu yang tidak pernah melewati angka 10%.

b. Model Islam Radikal

Islam Radikal adalah berawal dari kelompok Islam fundamentalis yang menempuh jalur non kooperatif. Menurut mereka tidak mungkin menerapkan syariat Islam kecuali dalam Negara Islam. Oleh karena itu pendirian Negara Islam bagi mereka menjadi suatu keharusan. Maka mereka pun menempuh jalur non kooperatif. Mereka mendirikan organisasi bawah tanah yang oleh pemerintah disebut OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indoonesia (NII). Dalam melakukan aksinya, mereka sama sekali tidak melakukan aksi-aksi militeristik, atau kriminal. Hal yang dilakukan adalah mengkonversi orang yang diajak bicara agar mau mengakui NII, dan merasa sebagai bagian dari NII, serta

menjalankan program-program NII. Orang yang telah berkenalan dengan NII ini terbagi dua. Ada yang semakin radikal hingga merasa bukan lagi sebagai rakyat NKRI. Ada pula yang balik membenci NII dan mengadukan kegiatan NII ini sebagai kegiatan makar terhadap pemerintah. Namun walaupun telah banyak pengaduan yang disampaikan, pemerintah pada era reformasi tidak melakukan tindakan represif, bahkan terkesan membiarkan.

c. Model Islam Anarkis

Islam anarkis adalah model Islam lain yang muncul pada masa reformasi. Mereka mengakui kedaulatan NKRI, menerima pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka menganggap tidak ada masalah dengan hal itu. Namun mereka melihat ada kesenjangan antara kenyataan yang ada dan gambaran mereka mengenai kehidupan Islami. Mereka geram melihat kemaksiatan, penistaan terhadap ajaran agama Islam, kemalasan umat dalam menjalankan ibadah dan lambannya pemerintah dalam menangani hal-hal seperti itu. Akibatnya dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran) mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis. Misalnya, mereka melakukan perusakan tempat-tempat hiburan malam, merazia rumah-rumah makan yang buka siang hari di bulan ramadhan, menghardik dan melakukan pemukulan terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap telah menyimpang dari ajaran standar. Bahkan dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik, terjadi pengepungan, pemukulan, perkelahian, pembakaran mobil hingga pembunuhan atas nama Islam. organisasi-organisasi yang mewakili Islam anarkis ini menurut penulis seperti FPI, FUUI dsb.

Banyak pihak yang gerah dengan tindakan-tindakan kelompok Islam anarkis ini, misalnya banyak yang mengusulkan agar FPI dibubarkan. Ketika usul ini tidak digubris oleh pemerintah karena FPI dilindungi undang-undang ORMAS, maka banyak pula yang mengusulkan agar undang-undang ORMAS ini diubah. Tapi alih-alih dibubarkan, FPI malah digandeng oleh pemerintah sebagai mitra untuk menegakkan ketertiban di tengah masyarakat. Hanya ketika

terjadi tindakan melawan hukum saja ORMAS itu ditindak, itu pun sebatas pelaku atau penanggung jawabnya, sedangkan organisasinya tetap dibiarkan hidup. Misalnya FPI tetap dibiarkan berkembang, hanya ketuanya saja yang dihukum, dalam kasus kekerasan yang mereka lakukan terhadap Aliansi Kebebasan Hidup umat Beragama yang tengah berdemonstrasi di MONAS saat memperjuangkan eksistensi Ahmadiyah di Indonesia.

d. Model Islam Teroris

Islam Teroris adalah kelompok Islam yang mirip dengan kelompok Islam Radikal. Mereka bercita-cita mendirikan khilafat Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di seluruh permukaan bumi ini. Untuk itu mereka mendirikan organisasi bawah tanah yang terintegrasi secara Internasional. Di Indonesia jaringan tersebut adalah Jama'ah Islamiyah. Dalam melakukan aksinya, mereka sama sekali tidak segan-segan melakukan aksi-aksi militeristik, atau kriminal. Bom bunuh diri, pembunuhan aparat kepolisian dan lain sebagainya. Mereka mengkonversi orang yang diajak bicara agar mau ikut kegiatan mereka, mereka juga melakukan teror dan mendidik serta menggunakan pengikutnya untuk melancarkan aksi teror. Musuh mereka terutama adalah Amerika dan Negara-negara sekutunya. Dan ketika Indonesia mendirikan DENSUS 88 anti Teror mereka mulai melihat NKRI, terutama polisinya sebagai antek-antek Barat yang layak menjadi sasaran aksi teror mereka. Terhadap kelompok ini Negara menyatakan perang.

e. Model Islam Sempalan

Islam sempalan adalah kelompok Islam yang menganut ajaran Islam sinkretik. Kelompok ini dianggap sempalan dan menyimpang oleh pemegang otoritas Islam. Tidak jarang mereka dituduh telah melakukan penistaan terhadap ajaran agama Islam. Terhadap mereka disodorkan dua pilihan, kembali kepada ajaran Islam ortodok atau menyatakan diri keluar dari Islam. Di era reformasi ini banyak dari golongan ini yang menyatakan

keluar dari Islam dan tidak menganut agama apapun melainkan hanya kepercayaan kepada tuhan saja. Dalam KTP identitas agama mereka dikosongkan. Pada masa sebelum Reformasi mereka dipaksa untuk memilih salah satu dari lima agama yang diakui oleh Negara. Setelah masa reformasi Negara memperbolehkan mereka tidak menganut agama apapun melainkan kepercayaan saja.

Tapi ada pula kasus-kasus dimana pelaku Islam sempalan atas desakan otoritas Islam yang diakui oleh Negara yaitu MUI, didesak untuk meninggalkan ajarannya dan bertaubat serta kembali mengakui dan menjalankan ajaran Islam ortodok. Kasus Admad Musadek yang mengaku sebagai nabi misalnya diselesaikan dengan cara seperti ini. Namun dalam kasus ahmadiyah, menjadi cukup rumit karena pengikut Islam sempalan ini mempunyai pengikut yang cukup besar dan terhubung dengan jaringan Internasional. Negara rupanya salah tingkah dan tidak memberikan solusi yang tepat. Walaupun Negara mengeluarkan SKB 3 menteri dalam pelarangan Ahmadiyah tetapi, Negara tidak memberikan solusi yang pasti dalam pelaksanaannya dilapangan. Hal ini berimbas pada munculnya berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam anarkis yang merasa sebagai polisi agama yang berhak menghakimi bahkan sampai membunuh mereka.

C. SIMPULAN

Hubungan antara Indonesia dan masyarakat Islam di Indonesia diwakili oleh organisasi afiliasi Islam pada awal kemerdekaan sampai masa reformasi pada tahun 1998. Melihat fenomena yang berkembang dari banyak organisasi keagamaan yang muncul dari fundamental, radikal, sekuler hingga sinkretisme. Gejala antara pemerintah dan organisasi keagamaan membawa fenomena kepulauan Islam. satu tema yang diprakarsai antara pemerintah dan umat Islam Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi model Islam yang mewakili bangsa Indonesia di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muridan S. Widjojo dan Mashudi Noorsaliam, *Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2004.
- M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1994.
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 1987.
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo* (Jakarta: Darul Falah) 1420 H.
- Mustofa Bisri, *Koridor: Renungan A. Mustofa Bisri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2010.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta; Paramadina), 1998.
- Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta; LIPI Press), 2005.
- Deden Ridwan, dkk, *Membangun Konsensus Pemikiran dan Praktek Politik Akbar Tanjung*, (Jakarta: PT Surya Multi Grafika), 2003.